

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki budaya yang begitu banyak dan beraneka ragam, budaya sendiri merupakan identitas diri bagi suatu bangsa. Indonesia sendiri suatu negara kepulauan yang meliputi lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang tersebar di dunia (Fauzan, 2022). Kekayaan alam yang berlimpah menjadikan tempat-tempat di Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu tujuan wisata baik wisatawan lokal ataupun nasional manca negara. Pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam(Prabowo, 2020)

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. *United Nation World Organizations* (UNWTO) juga menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan sebuah sektor unggulan serta menjadi salah satu kunci dalam pembangunan serta pengembangan suatu wilayah ataupun negara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Hutasoit., 2021). Salah satu bentuk pariwisata

yang semakin berkembang adalah wisata alam, termasuk wisata mangrove. Mangrove tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga berfungsi sebagai pelindung alami terhadap abrasi pantai dan habitat bagi berbagai spesies laut.

Kawasan wisata Mangrove Jung Koneng di Desa Labuhan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, merupakan salah satu contoh destinasi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kawasan ini juga memiliki daya tarik wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan wisata ini belum berjalan optimal karena adanya ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan tingkat desa dan tingkat kabupaten.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan sebagai dokumen acuan utama pembangunan pariwisata di daerah seharusnya memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk ekowisata mangrove di Desa Labuhan. Sayangnya, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakselarasan antara dokumen perencanaan lokal dengan dokumen perencanaan RIPPARKAB. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan yang ideal dan kondisi nyata di lapangan, di mana pemerintah desa sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap dokumen perencanaan kabupaten, yang menyebabkan kurangnya dukungan dan koordinasi.

Manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung pantai dari abrasi, gelombang air

pasang (rob), tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu (Utomo., 2018).

Wisata alam Mangrove Labuhan merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan sebagai pariwisata penghasil desa atau daerah Bangkalan, memiliki banyak penduduk yang gemar pergi berwisata dan memiliki lokasi yang dekat dengan universitas yang ada di Bangkalan juga merupakan potensi untuk menarik pengunjung dari kalangan mahasiswa dan Masyarakat (Helda, 2022).

Berdasarkan dokumen perencanaan wisata Mangrove Jung Koneng, di Desa Labuhan mulai dari 2013 dimana terjadi penebangan dan pemburuan mangrove, akibatnya mangrove menjadi rusak bahkan tercatat 17,5 ha rusak parah dan tertinggi dari 5 desa sekitar, lanjutnya pada tahun 2014 bersama dengan Pertamina Hulu Energi (PHE), *West Madura Offshore* (WMO) mengajak masyarakat untuk menanam bibit mangrove sebanyak 17.000, tahun 2015 taman pendidikan mangrove menjadi pusat pariwisata dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kunjungan wisata baik perorangan maupun Lembaga melalui promosi di sosial media facebook.

Selanjutnya pada tahun 2017-2018 pengembangan Kawasan barat melalui konservasi terumbu karang, 2018 terjadi konflik kepemilikan lahan sebagai local hero turut memediasi konflik menyampaikan informasi dan keterangan kepada pemerintah daerah dan Pertamina Hulu energi (PHE), *West Madura Offshore* (WMO). Tahun 2019 konflik terselesaikan, Tahun 2019-2020 mendukung Desa Labuhan menjadi contoh Desa Wisata Pesisir Terintegritas. Dalam hal ini, integritas yang dimaksud mencakup beberapa aspek:

1. Integrasi ekologi: menggabungkan konservasi mangrove dengan pengembangan wisata berkelanjutan.
2. Integrasi ekonomi: melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata dan menciptakan peluang ekonomi baru.
3. Integrasi sosial-budaya: memadukan nilai-nilai tradisional masyarakat pesisir dengan pengembangan pariwisata modern.
4. Integrasi manajemen: menyelaraskan pengelolaan wisata antara pemerintah desa, kabupaten, dan pihak swasta.

Tahun 2021 menjadi kontribusi dalam pengumpulan data adaptasi dan mitigasi mendukung pencapaian Desa Proklimdari Program Kampung Iklim KLHK.

Saat ini zona Kawasan ekowisata labuhan 53 Ha. Pencapaian dalam peran kelembagaan yaitu bekerjasama dengan Pertamina Hulu energi (PHE), *West Madura Offshore* (WMO) untuk memberdayakan dan menciptakan lapangan kerja baru , mendorong kelompok Perempuan untuk mengembangkan UKM dan berani mengemukakan pendapat. Program ini aktif dalam pengembangan Wisata di Bangkalan seperti aktif berdiskusi dengan pemerintah daerah, aktif membina dan mengembangkan media promosi. Selain itu inovasi program seperti warung apung, diorama edukasi terumbu karang, trekking dan *coffe on the bus* dan odong-odong. Ekowisata Pesisir Labuhan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Dalam upaya mengembangkan potensi wisata tersebut, pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyusun berbagai dokumen perencanaan, termasuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

(RIPPARKAB). untuk RIPPARKAB sendiri, memang sangat dibuktikan bagi setiap kabupaten guna mengelola pariwisata yang ada (Safi., 2023).

Ripparkab adalah acuan utama dalam pembangunan kepariwisataan daerah yang menjadi acuan/arahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan kepariwisataan di daerah. Ripparkab mengatur beberapa aspek yaitu aspek pembangunan destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata, Ripparkab ini mengarahkan pembangunan kepariwisataan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakandan strategi pembangunan kepariwisataan yang telah dijabarkan ke dalam tahapan implementasi dalam bentuk program dan indikasi kegiatan Pembangunan kepariwisataan (Rahman, 2020). Kabupaten Bangkalan sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035. Di dalam PERDA RIPPARKAB tersebut juga sudah sekaligus ditetapkan DPK dan DTWK yang tercantum dalam pasal 10 ayat 2 dan 5.

Didalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025. Bahwa RIPPARNAS dan RIPPARProvinsi menjadi pedoman penyusunan RIPPARKabupaten. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah di bawahnya harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di atasnya (Pawestri, 2022).

Namun, dalam implementasinya, ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pemerintah dengan dokumen perencanaan desa khususnya

dokumen perencanaan wisata sering terjadi. Beberapa aspek ketidakselarasan yang teridentifikasi meliputi:

1. Perbedaan prioritas pengembangan: RIPPARKAB mungkin menekankan pengembangan infrastruktur skala besar, sementara perencanaan desa lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal.
2. Ketidakselarasan tim eline: Jadwal implementasi yang ditetapkan dalam RIPPARKAB mungkin tidak sejalan dengan kemampuan dan kesiapan desa dalam mengembangkan wisata.
3. Alokasi sumber daya: Terdapat perbedaan dalam alokasi anggaran dan sumber daya manusia antara yang direncanakan di tingkat kabupaten dan yang tersedia di tingkat desa.
4. Pendekatan konservasi: RIPPARKAB mungkin memiliki standar konservasi yang lebih ketat dibandingkan dengan yang direncanakan oleh desa, atau sebaliknya.
5. Target pasar wisatawan: Mungkin ada perbedaan dalam segmentasi pasar wisatawan yang ditargetkan antara rencana kabupaten dan desa.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses desa terhadap dokumen-dokumen pemerintah, yang sering kali disimpan tanpa diinformasikan kepada pihak desa. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa dalam proses perencanaan juga berkontribusi pada muncul nya ketidakselarasan ini. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program, inefisiensi penggunaan sumber daya, dan potensi konflik dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata.

Mengingat pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan tingkat kabupaten dengan inisiatif pengembangan wisata lokal, perlu dilakukan kajian

mendalam mengenai keselarasan antara RIPPARKAB Bangkalan dengan dokumen perencanaan Mangrove Jung Koneng. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan wisata Mangrove Jung Koneng sejalan dengan visi, misi, dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan.

Kesenjangan ini sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan pariwisata di tingkat kabupaten dan lokal. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan kebijakan yang diterapkan dapat mendukung pengembangan wisata secara berkelanjutan, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), keselarasan perencanaan di semua tingkatan pemerintahan sangat diperlukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan pariwisata secara nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan Mangrove Jung Koneng RIPPARKAB Bangkalan dengan RIPPARKAB Bangkalan, mengidentifikasi potensi kesenjangan atau ketidakselarasan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselarasan kedua dokumen tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan wisata Mangrove Jung Koneng dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus mendukung tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan.

Dengan melakukan keselarasan ini, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara kebijakan tingkat kabupaten dan implementasi di tingkat lokal, sehingga

dapat mengoptimalkan potensi wisata Mangrove Jung Koneng sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Bangkalan, sekaligus menjadi model pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Bagaimana tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan wisata Mangrove Jung Koneng di Desa Labuhan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan, dan apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan keselarasan kedua dokumen tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan wisata Mangrove Jung Koneng di Desa Labuhan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan, mengidentifikasi potensi kesenjangan atau ketidakselarasan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselarasan kedua dokumen tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep keselarasan perencanaan pariwisata antara tingkat kabupaten dan desa, terutama dalam konteks ekowisata mangrove. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan

kerangka analisis yang berguna dalam mengevaluasi keselarasan RIPPARKAB dengan dokumen perencanaan wisata lokal di daerah lain

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan:** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan dalam pengembangan pariwisata, khususnya di Wisata Mangrove Jung Koneng.
- b. Bagi Pengelola Wisata Mangrove Jung Koneng:** Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek perencanaan yang perlu diselaraskan dengan RIPPARKAB agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih optimal.
- c. Bagi Masyarakat Desa Labuhan:** Penelitian ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata lokal yang sejalan dengan kebijakan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar